

Analisis standar belanja untuk penyusunan RKA-APBD kegiatan penyelenggaraan rapat

Meilinda Trisilia

Entrepreneurship Department, BINUS Business School Undergraduate
Program Bina Nusantara University, Jakarta.

Abstrak

Penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah dituntut semakin realistis dan transparan. Di era digital, melalui program e-government, diharapkan dapat meningkatkan transparansi, control, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan Good Governance di pemerintahan bebas KKN. Penyusunan ASB akan membantu pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan serta efisiensi anggaran pemerintah daerah dapat tercapai. Penyusunan ASB ini bertujuan untuk membentuk model ASB kegiatan Rapat di Dalam Kantor dan di Luar Kantor yang digunakan untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya kegiatan tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dan pada analisis data menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Penelitian ini menghasilkan model ASB yang layak sehingga dapat digunakan sebagai pagu (acuan) dalam menyusun anggaran rapat di dalam dan di luar kantor pemerintah Kabupaten Lumajang.

Kata kunci: ASB; ordinary least square (ols); model regresi

Analysis of spending standards for the preparation of RKA-APBD for meeting activities

Abstract

The preparation and management of regional budgets is required to be more realistic and transparent. In the digital era, through the e-government program, it is expected to increase transparency, control, and accountability of government administration in the context of implementing Good Governance in KKN-free government. The preparation of the ASB will help regional financial management to be more transparent, fair, accountable and the efficiency of local government budgets can be achieved. The preparation of this ASB aims to establish an ASB model of In-Office and Out-of-Office Meeting activities which is used to assess the reasonableness of the workload and cost of these activities. This study uses descriptive research and data analysis using the Ordinary Least Square (OLS) method. This research produced a decent ASB model so that it can be used as a ceiling (reference) in preparing the budget for meetings inside and outside the Lumajang Regency government office.

Key words: ASB; ordinary least square (ols); regression model

PENDAHULUAN

Pemberlakuan otonomi daerah memiliki kewenangan untuk mengatur segala urusan pemerintahan daerah, salah satunya urusan yang berkaitan dengan pembangunan daerah. Pembangunan daerah disesuaikan dengan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan karakteristik daerah. Kekurangan anggaran mengakibatkan pembangunan daerah dapat terhambat, begitupun juga sebaliknya. Penyusunan anggaran daerah harus mempertimbangkan program kerja di setiap SKPD sehingga anggaran tersebut dapat diberikan secara adil dan wajar antar kegiatan sejenis, antar program dan antar SKPD. Oleh sebab itu, perlu adanya penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) sehingga efisiensi anggaran pemerintah daerah dapat tercapai. ASB merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Rapat dinas merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi termasuk instansi seperti pemerintahan daerah (PemDa). Adapun pelaksanaan rapat di pemerintahan seperti PemDa, dapat dilakukan di dalam maupun di luar kantor. Manfaat dilakukan rapat dinas di luar kantor untuk mendorong efektivitas keberhasilan rapat karena tempat rapat yang lebih representatif. Pada beberapa kasus seringkali pegawai PNS melaksanakan rapat dinas atau pertemuan di luar kantor terutama di hotel dengan menggunakan satuan biaya perjalanan dinas, yang sebenarnya dapat dilakukan di dalam kantor. Namun demikian, sistem rapat di luar kantor tidak dapat ditiadakan begitu saja, mengingat kapasitas gedung yang tersedia di PemDa tidak mencukupi jumlah pegawai yang ada di kantor PemDa seperti PemDa Kabupaten Lumajang, sehingga pada beberapa agenda tidak dapat dipaksakan untuk dilaksanakan di dalam kantor. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan anggaran (ASB) yang tepat agar anggaran yang diberikan dapat wajar, adil dan tidak merugikan pihak manapun serta seluruh kegiatan pemerintah daerah dapat berjalan semestinya.

METODE

Analisis Standar Belanja

Analisis Standar Belanja (ASB) adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu satuan kerja dalam satu tahun anggaran (Mulyadi, 2007). Kegiatan yang dimaksud adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. ASB memiliki peran penting dalam berbagai tahapan pengelolaan keuangan daerah (Bastian, 2006).

Pendekatan Perilaku Biaya

Perilaku biaya digunakan untuk menggambarkan apakah biaya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa mengalami perubahan jika output mengalami perubahan. Menurut Mulyadi (2007), biaya (cost) yang digunakan dalam menghasilkan suatu barang dan jasa di sektor swasta maupun publik dikategorikan dalam tiga jenis yaitu biaya tetap (fixed cost), biaya variabel (variable cost) dan biaya gabungan (mixed cost).

Pengelompokkan biaya tetap dan biaya variabel dalam kegiatan yang dilaksanakan di pemerintah daerah tidak mudah dilakukan karena cenderung bersifat campuran. Sehingga seringkali biaya yang diketahui hanya biaya total dan output yang dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan metode untuk memisahkan biaya total menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Metode yang dapat digunakan adalah metode scatterplot, metode titik tertinggi dan metode regresi.

Metode Estimasi Model Regresi

Pada penentuan perilaku cost menggunakan metode estimasi model regresi, diasumsikan bahwa hubungan antara cost dan volume of activity berbentuk linier.

$$Y=a+bX$$

Di mana Y merupakan variabel dependen (variabel tidak bebas) dan X merupakan variabel independen (variabel bebas). Pendugaan parameter regresi yaitu intercept (fixed cost) dan slope (average variable cost) dapat dilakukan menggunakan metode OLS. Prinsip dari metode OLS yaitu meminimumkan jumlah kuadrat residual. Apabila asumsi regresi klasik terpenuhi maka metode kuadrat terkecil otomatis memiliki sifat BLUE (Blue Linear Unbiased Estimator), yaitu sifat tidak bias dan memiliki ragam/varian yang minimum. Rumus OLS untuk menduga parameter tersebut adalah sebagai berikut:

$$a = \frac{\sum Y - b(\sum x)}{n}$$
$$b = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

Tahapan Analisis Standar Belanja

Penyusunan Analisis Standar Belanja terdiri dari tiga tahap berikut:

Tahap I, merupakan tahap pengumpulan data dimana semua SKPD mengumpulkan data kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memperoleh gambaran awal atas berbagai jenis kegiatan yang terjadi di pemerintah daerah. Pada tahap ini dilakukan pula identifikasi objek belanja pada alokasi anggaran masing-masing kegiatan di SKPD; dan

Tahap II, merupakan penyetaraan kegiatan yang dilakukan untuk mengelompokkan daftar berbagai kegiatan yang diperoleh dari tahap pengumpulan data ke dalam jenis atau kategori kegiatan yang memiliki kemiripan pola kegiatan dan bobot kerja yang sepadan.

Tahap III, merupakan proses pembentukan model ASB dari cluster (kelompok) yang ada pada tahap II.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil Analisis

Berdasarkan hasil rekapitulasi data DPA-SKPD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019 dapat diketahui bahwa di pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019 terdapat 68 SKPD dan mempunyai 904 kegiatan dan 2354 sub kegiatan yang direncanakan. Dari 904 kegiatan dan 2354 sub kegiatan tersebut diperoleh sebanyak 36 kelompok kegiatan yang memiliki kemiripan dalam hal pola kegiatan dan bobot kerja sepadan (setara). Selanjutnya dari sebanyak 36 kelompok kegiatan setara tersebut ditetapkan 27 kelompok kegiatan yang akan dibuatkan model Analisis Standar Belanja (ASB). Penurunan jumlah dari sebanyak 33 kelompok kegiatan menjadi sebanyak 27 kelompok kegiatan tersebut terjadi karena selain pada sebanyak 27 kelompok kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang tipikal di setiap SKPD, juga karena kegiatan tersebut memenuhi syarat pemodelan ASB.

Analisis Tahap

Pembuatan Database Berdasarkan SKPD

Dalam penyusunan model ASB tahap II, database dari tahap I dikelompokkan menjadi 33 kelompok kegiatan yang mempunyai kemiripan pola kegiatan dan bobot kerja yang sepadan (setara). Berdasarkan 36 kelompok kegiatan setara dari hasil proses tahap II dilakukan analisis deksriptif. Sehingga didapatkan informasi terdapat 36 kelompok kegiatan setara dengan 2352 Sub Kegiatan. Penurunan jumlah Sub Kegiatan menjadi 2352 Sub Kegiatan dikarenakan terdapat 2 Sub Kegiatan yang tidak memiliki pagu anggaran. Selain itu juga didapatkan informasi mengenai pagu anggaran maksimum, minimum, dan rata-rata.

Analisis Tahap

Penyetaraan Kegiatan ASB

Dalam penyusunan model ASB tahap II, database dari tahap I dikelompokkan menjadi 33 kelompok kegiatan yang mempunyai kemiripan pola kegiatan dan bobot kerja yang sepadan (setara). Berdasarkan 36 kelompok kegiatan setara dari hasil proses tahap II dilakukan analisis deksriptif. Sehingga didapatkan informasi terdapat 36 kelompok kegiatan setara dengan 2352 Sub Kegiatan.

Analisis Tahap III

Pembentukan Model ASB

Pada analisis tahap III, dilakukan tahap pembentukan model ASB dengan menggunakan analisis regresi dengan pendekatan Metode Kuadrat Terkecil (MKT) dalam proses pendugaan parameter fixed cost dan variable cost. Variabel independent (X) yang digunakan dalam pemodelan ASB adalah cost driver sedangkan variabel dependen (Y) adalah total pagu anggaran kegiatan. Pembentukan cluster pada SKPD di Kabupaten perlu dilakukan agar data lebih homogen dan pendugaan parameter lebih presisi. Selanjutnya dilakukan perumusan ASB dari tahap-tahap sebelumnya. Berikut hasil pembentukan model untuk jenis kegiatan Penyelenggaraan Rapat di Dalam Kantor dan jenis kegiatan Penyelenggaraan rapat di Luar Kantor.

Tabel 1.
Model ASB

Pengendali Belanja (Cost driver)	Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)	Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)	Formula ASB
Jumlah peserta rapat	-	Rp66.000 per peserta rapat	$Rp66.000 \times \text{jumlah peserta rapat}$
Jumlah peserta rapat	-	Rp169.050 per peserta rapat	$Rp169.050 \times \text{jumlah peserta rapat}$

Deskripsi:

Kegiatan penyelenggaraan rapat di dalam kantor merupakan Kegiatan diskusi yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang narasumber atau moderator untuk memperoleh masukan atau informasi mengenai permasalahan yang bersifat lokal dan spesifik dengan peserta bisa berasal dari perangkat daerah penyelenggara maupun gabungan dari 2 (dua) atau lebih perangkat daerah serta lembaga/organisasi masyarakat yang diselenggarakan di lingkungan kantor perangkat daerah penyelenggara. Sedangkan kegiatan penyelenggaraan rapat di luar kantor diselenggarakan di luar lingkungan kantor perangkat daerah penyelenggara. Berikut merupakan rata-rata alokasi objek belanja rapat di dalam dan di luar kantor.

Tabel 2.
Alokasi Objek Belanja Rapat di Dalam dan di Luar Kantor

Objek Belanja Rapat Dalam Kantor	N	Rata-rata (%)
Belanja Jasa Kantor	11	15.17
Belanja Cetak dan Penggandaan	13	11.11
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4	40.68
Belanja Makanan dan Minuman	45	33.04
Objek Belanja Rapat Luar Kantor	N	Rata-Rata (%)
Belanja Bahan Pakai Habis	1	2.58
Belanja Jasa Kantor	4	24.27
Belanja Cetak dan Penggandaan	2	2.00
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Parkir	2	17.63
Belanja Makanan dan Minuman	12	42.19
Belanja Perjalanan Dinas	11	11.33

Kelayakan Model ASB

Model ASB dikatakan layak ketika nilai variable cost (β_1) signifikan ($p\text{-value} < \alpha$) dan model tidak layak ketika nilai variable cost (β_1) tidak signifikan ($p\text{-value} > \alpha$), di mana α yang digunakan sebesar 0,05. Berapapun nilai N (sekali pun jumlah data kecil), apabila sudah signifikan maka model dianggap layak untuk digunakan karena dianggap sudah representatif. Kebaikan model bergantung pula dengan nilai R-square. Nilai R-square menunjukkan bahwa kontribusi variabel X dalam menjelaskan variabel Y.

Tabel 3.
Kelayakan Model ASB

N	R2	Sig	Kelayakan
216	0.4110	0.000	Layak
58	0.4460	0.000	Layak

Berdasarkan Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa model ASB rapat di dalam kantor dan di luar kantor layak digunakan. Sehingga model tersebut dapat digunakan untuk membantu dalam menentukan Total Belanja suatu rencana kegiatan, dalam hal ini rapat.

SIMPULAN

Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan salah satu pedoman yang wajib disusun dari tahun ke tahun dalam penetapan belanja daerah. Penentuan alokasi belanja terkadang dilakukan tanpa alasan yang pasti untuk setiap alokasi, oleh karena itu ASB dapat digunakan untuk menetapkan biaya dan pengalokasian anggaran untuk kegiatan SKPD agar lebih efisien.

Model ASB yang diperoleh dapat dijadikan standar, sehingga pagu anggaran setiap kegiatan lebih terukur. Data DPA-SKPD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019 yang dijadikan data analisis untuk pembentukan model ASB Tahun 2019 cukup bagus sehingga menghasilkan model – model ASB yang efisien dan efektif serta layak, khususnya model ASB untuk kegiatan Rapat di Dalam Kantor dan rapat di Luar Kantor.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Erlangga. Yogyakarta.
- Halim, A. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta.
- Kumorotomo, W. 2007. Penganggaran dan Penilaian Kewajaran Standar Analisis Belanja (SAB).
- Mardiasmo, 2009, Perpajakan, Edisi Revisi 2009, Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mulyadi. 2007. Activity Based Cost System: Sistem Informasi Biaya Untuk Pemberdayaan Karyawan Pengurangan dan Penentuan Secara Akurat Kos Produk dan Jasa. BPFE Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Nursini. 2010. Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Teori dan Aplikasi. Universitas Hasanuddin. Makassar. Tersedia di <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/22397>, diakses pada tanggal 31 Januari 2019